

ANALISIS *INFORMATION POVERTY* DAN REKONSTRUKSI SOSIAL-EKONOMI NELAYAN MELAYU PESISIR KECAMATAN MENDAHARA

M. Rizal Pahlefi
Universitas Islam Batang Hari
mrizalpahlefi1@gmail.com

Abstrak

Sistem patron-klien antara nelayan pesisir Melayu dan tengkulak telah berlangsung lama secara historis dan menciptakan kemiskinan struktural yang sulit diputus. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana relasi kuasa ekonomi tersebut langgeng melalui fenomena kemiskinan informasi (*information poverty*) serta bagaimana rekonstruksi sosial-ekonomi dapat dilakukan berbasis nilai kebudayaan Islam. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus kritis, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap nelayan di Kecamatan Mendahara, observasi partisipatif, dan analisis dokumen historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tengkulak mempertahankan monopolinya melalui taktik asimetri informasi, di mana nelayan sengaja diisolasi dari informasi harga pasar riil, regulasi bantuan pemerintah, dan alternatif pembiayaan syariah. Secara historis-kultural, ikatan utang dianggap sebagai jaminan sosial normatif dalam masyarakat Melayu, meskipun bertentangan dengan prinsip keadilan ekonomi (*'adalah*) dalam Islam. Sebagai solusi, artikel ini merumuskan model *Community Information Center* (Pusat Informasi Komunitas) berbasis masjid pesisir yang mengintegrasikan literasi informasi keuangan dengan sistem pembiayaan mikro syariah (BMT). Melalui model ini, ketergantungan nelayan terhadap tengkulak dapat dikikis secara bertahap melalui pemenuhan hak akses informasi ekonomi.

Kata Kunci: Kemiskinan Informasi, Nelayan Melayu, Patron-Klien, Sejarah Ekonomi Islam, Tengkulak.

Abstrack

The patron-client system between Malay coastal fishermen and middlemen (tengkulak) has historically persisted for a long time and has created structural poverty that is difficult to break. This article aims to analyze how these economic power relations are perpetuated through the phenomenon of information poverty, as well as how socio-economic reconstruction can be carried out based on Islamic cultural values. Using a qualitative approach with a critical case study method, data were collected through in-depth interviews with fishermen in Mendahara District, participatory observation, and historical document analysis. The research findings indicate that middlemen maintain their monopoly through information asymmetry tactics, in which fishermen are deliberately isolated from real market price information,

government aid regulations, and sharia financing alternatives. Historically and culturally, debt bondage is considered a normative social guarantee within Malay society, even though it contradicts the principle of economic justice ('adalah) in Islam. As a solution, this article formulates a Community Information Center model based in coastal mosques that integrates financial information literacy with a sharia microfinance system (BMT). Through this model, fishermen's dependence on middlemen can be gradually eroded by fulfilling their right to access economic information.

Keywords: *Information Poverty, Malay Fishermen, Patron-Client, Islamic Economic History, Middlemen*

Pendahuluan

Masyarakat Melayu pesisir di Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, merupakan entitas sosial yang secara historis memiliki keterikatan kuat dengan ekosistem kebaharian dan kebudayaan Islam (Huda et al., 2024.). Sebagai salah satu wilayah pesisir di Provinsi Jambi, Mendahara mengandalkan sektor perikanan tangkap sebagai urat nadi perekonomian masyarakatnya. Namun, di balik kekayaan potensi lautnya, potret kemiskinan struktural masih menjadi fenomena yang dominan di kalangan nelayan tradisional setempat. Azhar (2022) mengemukakan bahwa pendapatan nelayan di wilayah Tanjung Jabung Timur sangat fluktuatif karena ketergantungan pada hasil tangkapan harian, yang memicu kerentanan ekonomi keluarga nelayan. Kerentanan ini tidak sekadar disebabkan oleh faktor alamiah atau keterbatasan teknologi tangkap, melainkan akibat adanya jeratan struktur sosial-ekonomi yang eksploitatif dalam wujud sistem ijon atau hubungan patron-klien dengan tengkulak.

Keterikatan nelayan Mendahara terhadap tengkulak berakar dari sistem pemberian pinjaman awal (*advance money*) atau modal operasional melaut. Tengkulak hadir mengisi kekosongan peran institusi keuangan formal dengan menyediakan dana cepat tanpa birokrasi rumit untuk memenuhi kebutuhan hidup harian maupun logistik melaut (Imron, 2003). Sebagai konsekuensi normatif dari pinjaman tersebut, nelayan diwajibkan menjual seluruh hasil tangkapannya secara eksklusif kepada tengkulak pemodal dengan harga yang ditentukan sepihak oleh tengkulak. Hubungan patron-klien ini dalam kacamata sosiologi-historis masyarakat Melayu dipandang sebagai bentuk jaminan sosial (*social safety net*) tradisional yang bersifat resiprokal, meskipun secara riil menciptakan dependensi absolut dan langgengnya rantai kemiskinan (Scott, 1976; Adas, 1980).

Jika dikaji melalui perspektif Sejarah dan Kebudayaan Islam, fenomena monopoli harga oleh tengkulak ini kontradiktif dengan nilai-nilai keadilan ekonomi ('adalah) dan transparansi yang dijunjung tinggi dalam peradaban Islam Melayu. Budaya Melayu sejati selalu menempatkan syariat Islam sebagai sendi kehidupan melalui filosofi "*adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah*" (Syam, 2005; Hadi, 2021). Dalam hukum ekonomi Islam, praktik penentuan harga sepihak yang memanfaatkan ketidakberdayaan finansial pihak lain mengandung unsur kezaliman (*zulm*) dan ketidakjelasan transaksi (*gharar*) yang dilarang

karena merusak kemaslahatan umat (Chapra, 2000). Namun, alih-alih ditolak, sistem patronase ini justru bertahan lintas generasi di Mendahara karena dianggap sebagai warisan tata cara bertahan hidup historis masyarakat pesisir.

Akar masalah kelanggengan sistem eksploitatif ini tidak hanya berdimensi finansial, melainkan bersumber pada problem mendasar dalam disiplin ilmu perpustakaan dan informasi, yakni kemiskinan informasi (*information poverty*). Chatman (1996), dalam studinya mengenai perilaku informasi masyarakat marginal, menjelaskan bahwa kemiskinan informasi terjadi ketika sekelompok orang terisolasi dari akses informasi penting yang sebenarnya mampu mengubah kualitas hidup mereka. Nelayan tradisional di Mendahara mengalami asimetri informasi yang akut; mereka tidak memiliki akses terhadap pembaruan harga ikan riil di pasar induk, buta terhadap regulasi kebijakan dan skema bantuan perikanan dari pemerintah, serta tidak terpapar informasi mengenai alternatif pembiayaan mikro syariah seperti *qardhul hasan* yang bebas riba (Erhad, 2024)

Kondisi tuna-informasi ini dimanfaatkan oleh tengkulak untuk melakukan penahanan informasi (*information withholding*) agar nelayan tetap berada dalam ruang ketidaktahuan yang melanggengkan ketergantungan mereka (Liebkind et al., 2012). Oleh karena itu, penyelesaian problem nelayan di Kecamatan Mendahara tidak cukup sekadar bantuan modal fisik, melainkan rekonstruksi sosial melalui pemenuhan hak informasi ekonomi yang berbasis pada institusi lokal keagamaan yang dipercaya oleh masyarakat Melayu. Melalui kolaborasi lintas disiplin, artikel ini berupaya membedah relasi kuasa patron-klien di Kecamatan Mendahara dari aspek historis-kultural Islam sekaligus menawarkan solusi berbasis ilmu informasi melalui perancangan tata kelola diseminasi informasi berbasis komunitas. Diharapkan, pemutusan rantai asimetri informasi mampu menjadi katalisator bagi kebangkitan ekonomi Islam dan peningkatan kesejahteraan nelayan pesisir Melayu Mendahara.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus kritis untuk mengeksplorasi kelanggengan relasi patron-klien dan fenomena kemiskinan informasi pada nelayan Melayu di Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Guna merekonstruksi aspek sosial-historis sekaligus memetakan perilaku informasi informan, pengumpulan data primer dilakukan melalui observasi partisipatif di dermaga bongkar muat ikan serta wawancara mendalam yang melibatkan sepuluh nelayan tradisional skala kecil, tiga tokoh adat Melayu setempat, dan dua pengelola lembaga keagamaan. Pendekatan historis digunakan untuk menelusuri asal-usul keterikatan utang-piutang adat, sementara studi perilaku informasi digunakan untuk mengidentifikasi hambatan akses informasi ekonomi yang dialami oleh para nelayan dalam keseharian mereka (Muim dan Amin, 2025).

Seluruh data lapangan yang diperoleh kemudian dianalisis secara interaktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Peneliti mengontekstualisasikan temuan lapangan dengan mengonfrontasikan realitas ekonomi

nelayan Mendahara terhadap teori kemiskinan informasi (*information poverty*) dari Elfreda Chatman, sekaligus membedahnya menggunakan prinsip keadilan ekonomi dalam kebudayaan Islam Melayu. Untuk menjamin keabsahan dan validitas data hasil penelitian, dilakukan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari kelompok nelayan yang terikat tengkulak dengan data sekunder dari laporan berkala Penyuluh Perikanan Lapangan (PPL) serta dokumen monografi Kecamatan Mendahara.

Hasil dan Pembahasan

Konstruksi Sosial-Historis Relasi Patron-Klien di Kecamatan Mendahara

Temuan lapangan di Kecamatan Mendahara menunjukkan bahwa keterikatan nelayan tradisional terhadap tengkulak (disebut lokal sebagai *tauke*) bukan sekadar transaksi ekonomi sesaat, melainkan struktur sosial yang telah terkonstruksi secara historis lintas generasi. Sistem ini bermula dari skema *uang panjar* atau pinjaman modal operasional seperti bahan bakar, es balok, dan perbaikan jaring yang diberikan oleh *tauke* sebelum nelayan melaut. Ketidadaan lembaga keuangan formal yang adaptif terhadap karakteristik pendapatan nelayan yang tidak menentu membuat peran *tauke* menjadi mutlak sebagai katup penyelamat finansial. Kusnadi (2009) menegaskan bahwa bagi nelayan tradisional, pemenuhan kebutuhan melaut yang mendesak menuntut penyediaan modal yang cepat dan fleksibel, hal mana institusi perbankan formal sering kali gagal memenuhinya karena hambatan birokrasi dan persyaratan agunan.

Dalam pandangan sosiologi masyarakat Melayu Mendahara, hubungan ini lambat laun bergeser dari relasi bisnis murni menjadi ikatan moral atau jaminan sosial normatif (*social safety net*). Nelayan merasa memiliki utang budi yang besar karena *tauke* selalu hadir sebagai dewa penolong dalam meredam krisis domestik mereka, seperti biaya pengobatan keluarga yang mendadak atau biaya pendidikan anak. Fenomena relasi asimetris ini sejalan dengan teori ekonomi moral petani yang digagas oleh Scott (1976), yang menjelaskan bahwa masyarakat subsisten cenderung memprioritaskan prinsip "mendahulukan selamat" (*safety first*) melalui jaringan pengaman tradisional, meskipun hubungan tersebut mengorbankan independensi ekonomi mereka demi stabilitas kelangsungan hidup.

Dalam konteks nelayan Mendahara, ikatan patron-klien ini bukan sekadar transaksi ekonomi, melainkan telah terinternalisasi sebagai bagian dari tatanan sosial-budaya yang sarat dengan nilai-nilai moral. Sebagaimana diidentifikasi oleh Scott, pola hubungan patron-klien memiliki tiga ciri utama: *pertama*, terdapat ketidaksamaan dalam pertukaran (*inequality of exchange*) yang menggambarkan perbedaan dalam kekuasaan, kekayaan, dan kedudukan, di mana klien tidak mampu membalas sepenuhnya pemberian patron sehingga utang kewajiban mengikatnya dan ia bergantung pada patron; *kedua*, adanya sifat tatap muka (*face to face character*)—meskipun hubungan ini bersifat instrumental dengan perhitungan untung-rugi, unsur rasa tetap berpengaruh karena adanya kedekatan hubungan; *ketiga*, ikatan ini bersifat luwes dan meluas (*diffuse flexibility*), tidak terbatas pada hubungan kerja saja, melainkan juga mencakup hubungan pertetangga, kedekatan turun-temurun, dan jenis pertukaran yang tidak melulu uang atau barang tetapi juga bantuan tenaga dan dukungan kekuatan

Namun, jaminan sosial tradisional ini harus dibayar mahal dengan hilangnya kedaulatan ekonomi nelayan. Sebagai konsekuensi dari pinjaman adat tersebut, nelayan wajib menyerahkan seluruh hasil tangkapan mereka secara eksklusif kepada *tauke* tanpa adanya kepastian harga di awal. Praktik penentuan harga sepihak oleh *tauke* setelah ikan mendarat (*monopsoni*) menempatkan nelayan pada posisi tawar yang sangat lemah. Mubyarto et al. (1984) dalam studi klasiknya tentang ekonomi nelayan pesisir menggarisbawahi bahwa struktur pasar perikanan yang timpang ini sengaja dipertahankan oleh para pemilik modal guna menekan biaya perolehan bahan baku dan memaksimalkan margin keuntungan di tingkat pedagang besar.

Jika ditinjau dari perspektif Sejarah dan Kebudayaan Islam yang menjadi napas dari filosofi Melayu "*adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah*", praktik ini mengandung unsur eksploitasi (*zulm*) dan ketidakjelasan transaksi (*gharar*). Syam (2005) menyebutkan bahwa masyarakat Islam pesisir seharusnya menginternalisasi nilai keagamaan sebagai basis etika bermuamalah. Prinsip keadilan ekonomi (*'adalah*) dan asas suka sama suka atau sukarela (*an-taradin*) sebagaimana yang ditekankan dalam hukum perdagangan Islam menjadi tereduksi akibat keterpaksaan struktural yang dialami nelayan (Chapra, 2000). Ketidakmampuan nelayan untuk menentukan nilai komoditasnya sendiri karena terikat utang piutang bukan lagi mencerminkan transaksi komersial yang adil, melainkan bentuk subjugasi ekonomi. Akibatnya, nelayan di Kecamatan Mendahara terjebak dalam lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*) yang akut: mereka bekerja keras mempertaruhkan nyawa di laut, namun surplus ekonomi terbesar justru terakumulasi di tangan *tauke* akibat mekanisme penetapan harga yang tidak transparan dan manipulatif.

***Information Poverty* Sebagai Instrumen Kelanggengan Monopoli**

Penelitian ini menemukan bahwa langgengnya dominasi *tauke* di Kecamatan Mendahara tidak hanya dipicu oleh faktor ketergantungan modal finansial semata, melainkan dipelihara secara sistematis melalui fenomena kemiskinan informasi (*information poverty*) yang dialami oleh para nelayan tradisional. Mengacu pada paradigma lingkungan informasi masyarakat marginal yang digagas oleh Chatman (1996), nelayan Mendahara hidup dalam ekosistem informasi yang terisolasi dan mengalami asimetri informasi akut, di mana akses terhadap pengetahuan ekonomi yang krusial sengaja disembunyikan atau dibatasi oleh pihak yang berkuasa. Peneliti menemukan adanya tiga lapis hambatan informasi (*information barriers*) yang dihadapi nelayan di lapangan:

Pertama, Hambatan Akses Harga Riil; Nelayan tidak pernah mengetahui fluktuasi harga ikan yang berlaku di pasar induk eksternal seperti di Kuala Tungkal atau Kota Jambi. Informasi harga dikuasai penuh secara eksklusif oleh jaringan *tauke*. Menurut Britz (2004), ketidakadilan informasi semacam ini merupakan bentuk penindasan struktural di mana kelompok marjinal tidak memiliki komoditas informasi untuk menegosiasikan hak ekonomi mereka, sehingga nelayan terpaksa menerima harga berapa pun yang dideklarasikan oleh *tauke* secara pasrah.

Kedua, Hambatan Literasi Regulasi; Nelayan tidak terpapar informasi mengenai program bantuan perikanan dari pemerintah, kebijakan ruang kelautan, maupun skema subsidi

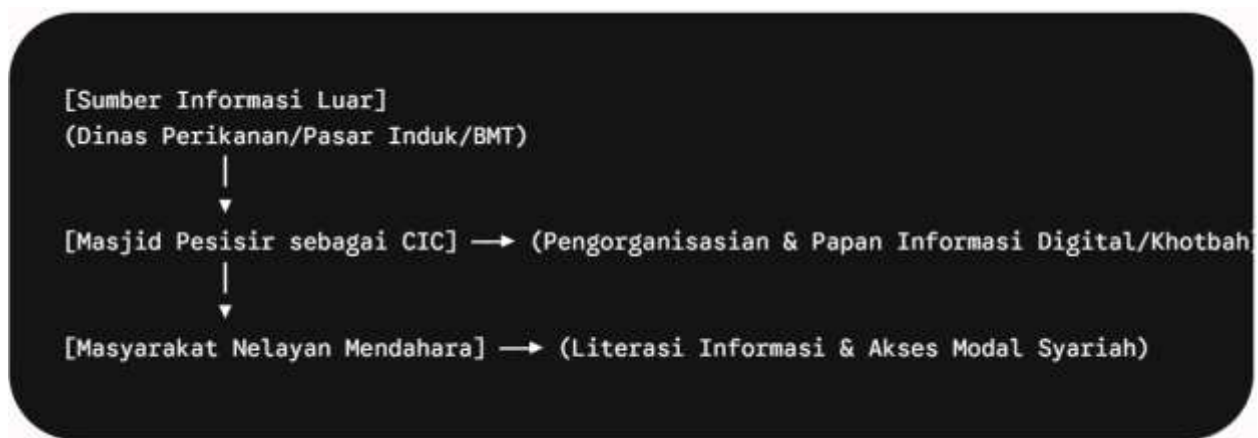
alat tangkap yang menjadi hak mereka. Ketidaktahuan kolektif ini sejalan dengan pandangan dari studi keliterasian yang menyebutkan bahwa rendahnya literasi informasi birokrasi membuat masyarakat kelas bawah merasa tidak memiliki pilihan atau alternatif hukum, sehingga memperkuat persepsi bahwa tidak ada jangkar penyelamat selain bergantung pada kebaikan *tauke* (Sturges & Chimseu, 1996; Mtega, 2012).

Ketiga, Hambatan Alternatif Permodalan; Adanya stigma kultural dan ketakutan institusional terhadap lembaga perbankan formal karena kerumitan administrasi dan syarat agunan digabung dengan ketiadaan saluran informasi mengenai lembaga keuangan mikro syariah (seperti Baitul Maal wa Tamwil atau Koperasi Syariah) yang beroperasi di wilayah Jambi. Minimnya diseminasi informasi mengenai sistem pembiayaan non-eksploitatif ini membuat nelayan tidak menyadari adanya alternatif modal kerja yang bersih dari sistem ijon berbalut riba (Chapra, 2000; Kader, 2021). Dalam ekosistem informasi yang pincang ini, *tauke* bertindak sebagai penjaga gerbang informasi (*information gatekeeper*) yang pasif dan manipulatif (Barzilai-Nahon, 2008). Mereka menerapkan taktik penahanan informasi (*information withholding*) guna menjaga ruang ketidaktahuan nelayan agar posisi tawar mereka tidak pernah naik. Di sisi lain, nelayan di Kecamatan Mendahara menunjukkan perilaku pencarian informasi yang cenderung menutup diri (*self-protective behavior* atau *information avoidance*) dari agen luar.

Sesuai dengan teori *Life in the Round* dari Chatman (1999), masyarakat yang mengalami kemiskinan informasi kronis sering kali menolak informasi dari luar lingkaran sosial mereka karena adanya rasa tidak percaya, perasaan "malu", atau ketakutan sosial apabila dicap tidak loyal oleh *tauke* yang selama ini menjadi pelindung hidup mereka. Kombinasi faktor psikologis-kultural dan hambatan struktural inilah yang menjadikan kemiskinan informasi sebagai instrumen paling efektif, murah, dan laten bagi *tauke* untuk melanggengkan monopoli harga mereka lintas generasi di wilayah pesisir Mendahara.

Masjid Pesisir Sebagai *Community Information Center* (CIC): Rekonstruksi Solusi

Untuk memutus rantai asimetri informasi dan ketergantungan ekonomi ini, penelitian ini merumuskan model rekonstruksi sosial melalui optimalisasi peran pranata keagamaan lokal yang sangat dihormati oleh masyarakat Melayu Mendahara, yaitu masjid pesisir. Mengingat institusi perpustakaan formal belum tersedia atau sulit diakses oleh nelayan tradisional di wilayah pedalaman pesisir, masjid dapat difungsikan ganda sebagai Pusat Informasi Komunitas (*Community Information Center/CIC*). Menurut Pettigrew (1996), dalam situasi di mana lembaga informasi formal absen, pemanfaatan lembaga lokal yang telah memiliki kepercayaan publik (*community trust*) sangat efektif untuk bertindak sebagai ruang ketiga dalam pemenuhan kebutuhan informasi masyarakat marginal. Model intervensi informasi ini dirancang dengan mengintegrasikan keahlian pengelolaan informasi dan pendekatan kultural keagamaan sebagai berikut:



Melalui model CIC ini, takmir masjid yang telah dilatih dalam tata kelola informasi bertindak sebagai *infomediary* (perantara informasi). Konsep *infomediary* ini sejalan dengan pandangan Meyer (2003) yang menyatakan bahwa masyarakat dengan tingkat literasi rendah memerlukan agen penerjemah (*information broker*) yang mampu mengolah informasi mentah menjadi pengetahuan siap pakai yang sesuai dengan konteks budaya lokal mereka. Masjid menyediakan papan informasi digital interaktif atau buletin mingguan yang memperbarui harga ikan harian secara transparan dari pasar induk. Selain itu, masjid bekerja sama dengan penyuluh perikanan dan akademisi untuk menyelenggarakan forum literasi informasi keuangan dan regulasi pemerintah di serambi masjid setelah waktu shalat berjamaah. Secara paralel, aspek Sejarah Kebudayaan Islam dihidupkan kembali dengan merekonstruksi fungsi historis masjid pada masa klasik Islam, yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah ritual (*mahdhah*), melainkan sebagai pusat Baitul Maal atau pos pemberdayaan ekonomi umat (Sardar, 2000; Hadi, 2025). Budaya Islam Melayu yang menempatkan masjid sebagai episentrum peradaban desa memberikan legitimasi teologis yang kuat bagi transformasi ini.

CIC berbasis masjid ini kemudian diintegrasikan dengan unit pembiayaan mikro syariah mandiri, baik berbentuk koperasi nelayan syariah maupun Baitul Maal wa Tamwil (BMT), yang menyediakan skema pembiayaan ramah nelayan seperti akad *Mudarabah* (bagi hasil) atau pinjaman kebajikan *Qardhul Hasan*. Antonio (2001) menjelaskan bahwa skema pembiayaan mikro syariah yang terbebas dari unsur bunga (*riba*) dan dikelola secara transparan merupakan pilar utama dalam mewujudkan keadilan distributif bagi kelompok dhuafa. Ketika nelayan Mendahara mulai terpenuhi kebutuhannya mengenai harga pasar yang akurat, mereka memiliki posisi tawar (*bargaining power*) yang kokoh untuk bernegosiasi. Dan ketika akses modal syariah alternatif tersedia di masjid, ikatan utang secara bertahap beralih fungsi dari *tauke* ke lembaga umat. Transformasi ini membuktikan bahwa pemenuhan hak atas informasi ekonomi (*information rights*) yang dikemas melalui pendekatan kultural Islam mampu menjadi instrumen pembebasan nelayan dari kemiskinan struktural.

Kesimpulan

Artikel ini menyimpulkan bahwa kelanggengan sistem patron-klien yang mengikat masyarakat nelayan tradisional di Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bukan sekadar dipicu oleh faktor ketergantungan modal finansial murni. Secara historis-kultural, relasi dengan *tauke* telah mengakar kuat sebagai bentuk jaminan sosial tradisional (*social safety net*) semu yang mengaburkan praktik eksploitasi (*zulm*) dan ketidakjelasan transaksi (*gharar*), yang sebenarnya bertentangan dengan pilar keadilan ekonomi ('*adalah*) dalam kebudayaan Islam Melayu. Faktor krusial yang melanggengkan monopoli ekonomi ini adalah fenomena kemiskinan informasi (*information poverty*) yang akut di kalangan nelayan. Ketidakberdayaan ekonomi para nelayan dirawat secara sistematis melalui asimetri informasi yang diciptakan oleh *tauke* sebagai *information gatekeeper*, berupa isolasi terhadap akses harga ikan riil, buta literasi regulasi pemerintah, dan minimnya saluran informasi permodalan alternatif yang syariah.

Sebagai upaya memutus rantai ketergantungan struktural tersebut, artikel ini menawarkan rekonstruksi sosial melalui revitalisasi fungsi masjid pesisir sebagai *Community Information Center* (CIC). Model ini terbukti secara konseptual mampu mengintegrasikan keahlian tata kelola informasi (Ilmu Perpustakaan) dengan pendekatan nilai keagamaan lokal (Sejarah Kebudayaan Islam). Melalui pemanfaatan masjid sebagai agen perantara informasi (*infomediary*) harga pasar dan regulasi, yang sekaligus diintegrasikan dengan lembaga pembiayaan mikro syariah (BMT/Koperasi Syariah) berbasis akad non-eksploitatif seperti *Mudarabah* dan *Qardhul Hasan*, kedaulatan ekonomi nelayan dapat dipulihkan. Pemenuhan hak atas informasi ekonomi yang dikemas lewat pendekatan kultural-keagamaan ini menegaskan bahwa transformasi masyarakat marginal harus dimulai dengan pengikisan kemiskinan informasi guna mewujudkan keadilan sosial-ekonomi yang berkeberlanjutan di wilayah pesisir Melayu Mendahara.

Daftar Pustaka

- Adas, M. (1980). "Moral Economy" or "Contest State"?: Elite Demands and the Origins of Peasant Protest in Southeast Asia. *Journal of Social History*, 13(4), 521–546. <http://www.jstor.org/stable/3787431>
- Antonio, M. S. (2001). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Gema Insani Press.
- Azhar, M. R. (2022). Pola konsumsi dan pendapatan rumah tangga nelayan tradisional di wilayah pesisir Jambi. *Iltizam Journal of Shariah Economic Research*, 2(2), 89-107.

- Barzilai-Nahon, K. (2008). Toward a theory of network gatekeeping: A framework for exploring information control. *Journal of the American Society for Information Science and Technology*, 59(9), 1493-1512.
- Britz, J. J. (2004). To know or not to know: A moral reflection on information poverty. *Journal of Information Science*, 30(3), 192-204.
- Chapra, M. U. (2000). *The future of economics: An Islamic perspective*. The Islamic Foundation.
- Chatman, E. A. (1996). The impoverished life-world of outsiders. *Journal of the American Society for Information Science*, 47(3), 193-206.
- _____. (1999). A theory of life in the round. *Journal of the American Society for Information Science*, 50(3), 207-217.
- Erhard, F. (2024) Culture and poverty from a lifeworld stance: rehabilitating a controversial conceptual pair. *Am J Cult Sociol* 12, 1–24. <https://doi.org/10.1057/s41290-022-00170-5>
- Hadi, B. (2025). The Role of Mosques as Centers of Social Innovation in the Development of Urban Islamic Communities. *Journal on Islamic Studies*, 1(4), 246-256. <https://doi.org/10.35335/cwbfwx02>
- Hadi, S. (2021). Pesantren Tradition and Islamic Cosmopolitanism in the Northern Coastal Communities of Java. *Muqoddima: Jurnal Pemikiran Dan Riset Sosiologi*, 2(1), 79-98. <https://doi.org/10.47776/MJPRS.002.01.06>
- Huda, I. A. I. S., Mustajab, M., Gunawan, H., Prasaja, A. S., Harianto, D., Sugiarto, A., & Al Khalidy, D. (2024). Peningkatan komunitas Desa Tangguh Bencana dalam Pengurangan Risiko Bencana (PRB) kebakaran di Desa Mendahara Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. *PERDIKAN (Journal of Community Engagement)*, 6(1), 40-52.
- Imron, A. (2003). *Pemberdayaan masyarakat nelayan*. Media Pressindo.
- Kader H (2021), "Human well-being, morality and the economy: an Islamic perspective". *Islamic Economic Studies*, Vol. 28 No. 2 pp. 102–123, doi: <https://doi.org/10.1108/IES-07-2020-0026>
- Kusnadi, K. (2009). *Kebudayaan masyarakat nelayan*. LKiS Yogyakarta.
- Liebkind, K., Jasinskaja-Lahti, I., & Solheim, E. (2012). Information asymmetry and trust building in marginal communities. *International Journal of Intercultural Relations*, 36(4), 511-522.
- Meyer, H. W. (2003). Information use in rural development. *Saitis News*, 5(1), 11-14.
- Mtega, W. P. (2012). Access to and Usage of Information among Rural Communities: a Case Study of Kilosa District Morogoro Region in Tanzania. *Partnership: The Canadian*

Journal of Library and Information Practice and Research, 7(1).
<https://doi.org/10.21083/partnership.v7i1.1646>

- Muin, Abdul dan Rahman Amin. (2025). Kemiskinan Struktural dalam Kehidupan Masyarakat Pesisir Kabupaten Takalar. *Phinisi Integration Review*, 8(3).
- Mubyarto, Sutrisno, L., & Dove, M. R. (1984). *Nelayan dan kemiskinan: Studi ekonomi antropologi di dua desa pantai*. Rajawali Pers.
- Pettigrew, K. E. (1996). Nurses as information providers in community settings: An emergent theory of information dyad. *Journal of Documentation*, 52(4), 361-373.
- Sardar, Z. (2000). *The mosque as a community center*. Mansell Publishing.
- Scott, J. C. (1976). *The moral economy of the peasant: Rebellion and subsistence in Southeast Asia*. Yale University Press.
- Sturges, P., & Chimseu, G. (1996). The information needs of rural communities. *Frontiers of Information and Library Science*, 1(1), 17-32.
- Syam, N. (2005). *Islam pesisir*. LKiS Pelangi Aksara.